

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- A.Ubaidillah, *et al.* 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) : Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press.
- Alan Dahl, Robert. 1982. *Dilemmas of Pluralist Democracy : Autonomy and Control*. New Haven and London: Yale University Press.
- Arifin, Firdaus dan Fabian Riza Kurnia. 2019. *Penjabat Kepala Daerah*. Yogyakarta: Thafa Almuni.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fuady, Munir. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim, Abdul Aziz. 2018. *Impeachment Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Johanes, Ayu Widowati. 2020. *Pilkada Mencari Pemimpin Daerah*. Bandung: Cendikia Press.
- Ladiqi, Suyatno dan Ismail Wekke. 2018. *Gambaran Demokrasi: Demografi dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Gawe Buku.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sabon, Max Boli. 2011. *Hukum Otonomi Daerah*. Jakarta: Universitas Atmajaya.
- Santoso, Topo dan Ida Budhiati. 2019. *Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sunarno, Siswanto. 2012. *Hukum Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suteki dan Galang Taufani. 2020. *Metode Penelitian Hukum : Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Rajawali Press.

Utrecht, Ernst. 1997. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Grafindo.

### **Jurnal :**

Fajri, Pujangga Candrawijyaning. (2023). “Reformulasi Mekanisme Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Sebagai Sistem Penguatan Sistem Demokrasi.’ *Siyasah, Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 3, no. 2, hlm. 190 – 213.

Mahardika, Ahmad Gelora, *et al.* (2022). “Problematika Yuridis Pengisian Pejabat Kepala Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, vol. 2, no. 2, hlm. 22 – 36.

Marwi, Akhmad. (2016). “Kewenangan Pejabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi pada Pemerintahan Kota Mataram).” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 4, no. 3, hlm. 542 – 558.

Rahmazani. (2023). “Problematika Pengisian Jabatan Pejabat Kepala Daerah di Masa Transisi Pra Pilkada 2024.” *Jurnal Konstitusi*, vol. 20. Nno. 3, hlm. 196 – 215.

Ramanda, Dio Ekie. (2022). “Menata Ulang Kewenangan Pejabat Kepala Daerah.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, vol. 6, no. 3, hlm. 161 – 168.

Rismahayani dan Aprinelita. (2023). “Tinjauan Yuridis Pejabat Kepala Daerah dalam Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.” *Kodifikasi*, vol. 5, no. 1, hlm. 16 – 30.

Rizal, Akhmad. 2022. “Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan.” *Indonesian Annual Conference Series*, vol. 1, hlm. 136 – 140.

Wasisto, Aryo. 2023. “Transparansi Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah 2023.” *Info Singkat*, vol. 15, no. 15, hlm. 6 – 10.

Wildad, Zaqil. 2023. “Parameter Demokrasi dalam Penunjukan Kepala Daerah.” *At-Tanwir Law Review*, vol. 3, no. 1, hlm. 88 – 109.

Wisandi, Riski. (2017). “Tinjauan Terhadap Fungsi Pengawasan Inspektorat Jenderal KEMENDIKBUD Jakarta dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan di Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (Suatu Kajian Yuridis Permendikbud No. 11 Tahun 2015)”. *Universitas Diponegoro*.

#### **Skripsi/Tesis/Disertasi :**

Fanhar, Frisca Tyra M. 2016. *Kewenangan Pejabat Kepala Daerah dalam Melaksanakan Mutasi Kepegawaian di Kota Bandar Lampung*. Universitas Lampung.

Lestari, Wiwin Arifatul. 2019. *Pengangkatan Pejabat Gubernur dari Kalangan Polri dalam Perspektif Teori Masalah Mursalah Imam Najamuddin Al-Thufi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 33. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.

## **Internet**

\_\_\_\_\_, 2023, *Perkembangan Sidang Keterbukaan Informasi Penunjukan Penjabat Kepala Daerah: Kemendagri Harus Buka Akses Dokumen Pengangkatan Penjabat!*, Indonesia Corruption Watch, diakses pada 22 Maret 2024, <https://antikorupsi.org/id/perkembangan-sidang-keterbukaan-informasi-penunjukan-penjabat-kepala-daerah-kemendagri-harus-buka>.

Kusnandar, Viva Budi, 2022, *271 Kepala Daerah Akan Lengser Sebelum Pilkada 2024*, Katadata, diakses 22 Maret 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/271-kepala-daerah-akan-lengser-sebelum-pilkada-2024>.

Setyaningrum, Puspasari, 2022, *Sejarah Pilkada Dari 2015 Hingga 2019*, Kompas, diakses 21 Maret 2024, <https://regional.kompas.com/read/2022/01/27/200758078/sejarah-pilkada-dari-2015-hingga-2019?page=all>, diakses pada 21 Maret 2024.